

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

Tesis

Dosen Pembimbing :

Dr. Suhandi, SE., M.Si., Ak., CA



Diajukan Oleh :

AULIA SRI ANGRAINI

2020532017

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

Oleh: Aulia Sri Angraini (2020532017)
(Dibawah bimbingan Dr. Suhanda., SE., M.Si., Ak., CA)

ABSTRAK

Pemerintah sangat mendukung adanya sistem tata kelola yang baik, khususnya pada badan usaha. Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem yang mengatur arah kegiatan perusahaan yang akan dilakukan, termasuk dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan mengukur keberhasilan pelaksanaan perusahaan. Implementasi tata kelola perusahaan mengurangi masalah keagenan antara pemilik dan manajer. Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu menghindari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat latar belakang terbentuknya dan praktik tata kelola di PDAM Kabupaten X dengan mengaitkannya dengan teori keagenan. Data yang diolah adalah data primer hasil wawancara. Hasil kajian menemukan bahwa tujuan didirikannya PDAM adalah diperlukannya suatu lembaga yang mengelola dan mengendalikan kebutuhan masyarakat di bidang air dan sebagai perantara dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sistem pelayanan minimal (SPM). Dan dalam praktik tata kelola PDAM dikaitkan dengan teori keagenan, terdapat tiga tema yaitu bagi perantara utama dalam melakukan pengawasan PDAM Kabupaten X yaitu dewan pengawas telah mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada. Pokok bahasan yang kedua adalah tentang hubungan antara agen dan prinsipal, dari hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen berupa akuntabilitas dan transparansi. Dan topik terakhir tentang korporatisasi, hasil penelitian di PDAM Kabupaten X, pemerintah daerah telah menyerahkan semua kewenangan dan manajemen sepenuhnya kepada manajemen PDAM untuk mengatur dan mengelola. Namun penyerahan secara penuh kepada pemerintah daerah tetap akan dikendalikan dan diawasi oleh kegiatan PDAM dibantu oleh badan pengawas.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Agency Theory; Korporatisasi; Tata Kelola; Tranparansi



DRINKING WATER REGIONAL CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE (PDAM)

Oleh: Aulia Sri Angraini (2020532017)
(Dibawah bimbingan Dr. Suhandana., SE., M.Si., Ak., CA)

ABSTRACT

The government strongly supports the existence of a good governance system, especially in business entities. Good corporate governance is a system that regulates the direction of activities of a company to be carried out, including in setting goals to be achieved and measuring the success of the company's implementation. The implementation of corporate governance reduces agency problems between owners and managers. Good corporate governance can help avoid conflicts of interest between principals and agents. This study aims to see the background of the formation and practice of governance in PDAM Kabupaten X by linking it with agency theory. Processed data is primary data from interviews. The results of the study found that the purpose of establishing a PDAM is that an institution is needed to manage and control the needs of the community in the field of water and an intermediary from the government's responsibility in providing a minimal service system (SPM). And in terms of PDAM governance practices associated with agency theory, there are three themes, namely for the principal intermediary in supervising PDAM Kabupaten X namely that the supervisory board has complied with the existing rules and regulations. The second point of discussion is about the relationship between the agent and the principal, from the results of the study it was found that the relationship between the principal and agent is in the form of accountability and transparency. And the last topic about corporatization, the results of research on PDAM Kabupaten X, the local government has handed over all authority and management fully to the PDAM management to manage and manage. However, the full handover to local governments will still be controlled and supervised by PDAM activities assisted by the supervisory board.

Keywords: Accountability; Agency Theory; Corporatization; Governance; Transparency